

PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PILAR TRANSPARANSI PEMERINTAHAN

**Eka Deviani¹, Anggiat Risky Halomoan Sibuea², Dame Melani
Pasaribu³, Felicia Marsha Uli Sijabat⁴, Melanie Cintya Putri⁵, Nova
Cecelya Simanjuntak⁶**

*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung
anggiatsibuea1@gmail.com, deimsmlnii@gmail.com, feliciasijabat7
906@gmail.com, cntyamelan@gmail.com, novacecelyas@gmail.com*

Abstrak

Transparansi keuangan negara merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi publik dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat demokrasi ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menganalisis peran krusial partisipasi publik dalam menciptakan transparansi keuangan negara sebagai pilar utama pemerintahan yang bertanggung jawab. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus implementasi transparansi anggaran di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penganggaran, audit publik, dan pengawasan fiskal secara signifikan meningkatkan transparansi dan menurunkan risiko korupsi. Namun, masih terdapat hambatan struktural dan kelembagaan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan partisipasi publik. Kesimpulannya, partisipasi publik yang efektif memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat civil society, dan media massa dalam membangun ekosistem transparansi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Transparansi keuangan, partisipasi publik, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, demokrasi ekonomi*

A. PENDAHULUAN

Transparansi keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan bermartabat. Dalam konteks reformasi pengelolaan keuangan publik, transparansi bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan imperatif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Partisipasi publik dalam proses pengelolaan keuangan negara menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah digunakan sesuai dengan kepentingan publik dan tidak tersalahgunakan.¹

Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik. Diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menandai komitmen negara untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Namun, implementasi transparansi keuangan negara masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan teknis, kelembagaan, hingga kesadaran masyarakat yang masih terbatas dalam memanfaatkan akses informasi yang telah disediakan.

Partisipasi publik dalam keuangan negara mencakup berbagai dimensi, antara lain: (1) partisipasi dalam tahap perencanaan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); (2) keterlibatan dalam proses pengawasan melalui audit sosial dan partisipasi dalam lembaga pengawasan; serta (3) akses dan penggunaan informasi keuangan publik untuk tujuan kontrol sosial. Ketiga dimensi tersebut saling terhubung dalam menciptakan ekosistem transparansi yang komprehensif.²

Mengingat pentingnya transparansi keuangan negara dan partisipasi publik, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan

¹ Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga, hlm. 45.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hlm. 12.

penelitian berikut: Bagaimana peran partisipasi publik dalam menciptakan transparansi keuangan negara? Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi publik? Bagaimana strategi yang efektif untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran dan fungsi partisipasi publik dalam mewujudkan transparansi keuangan negara; (2) mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi partisipasi publik; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas partisipasi publik. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori tata kelola pemerintahan serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan civil society dalam meningkatkan transparansi keuangan publik.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual Transparansi Keuangan Negara

Transparansi keuangan negara dapat dipahami sebagai kebijakan pemerintah untuk membuat seluruh proses pengelolaan keuangan publik dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat. Konsep transparansi ini bersumber dari prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan publik harus dijalankan atas dasar keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, transparansi merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara operasional, transparansi keuangan negara mencakup keterbukaan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran negara, proses pengambilan keputusan fiskal, dan hasil audit keuangan. Keterbukaan ini harus mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari tahap penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan fiskal

pemerintah, mengkritisnya jika dipandang merugikan publik, dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan.³

Partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara dapat dipetakan dalam berbagai tahap siklus anggaran. Pada tahap perencanaan, partisipasi publik terwujud melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui forum Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka yang kemudian menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada publik untuk mempengaruhi alokasi sumber daya publik sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal.⁴ Pada tahap penyusunan dan penetapan anggaran, partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya adalah: (1) partisipasi dalam rapat dengar pendapat umum di DPR/DPRD; (2) penyampaian pendapat melalui media massa atau forum diskusi publik; dan (3) pengajuan usul dan saran secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Semakin terbuka proses penyusunan anggaran, semakin besar kesempatan bagi publik untuk mempengaruhi keputusan alokasi anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.⁵

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi publik umumnya berwujud dalam bentuk pengawasan implementasi program dan proyek. Masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap kualitas pelaksanaan program publik, baik melalui kunjungan lapangan, focus group discussion (FGD), maupun survey kepuasan publik. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran memungkinkan publik untuk memverifikasi apakah program yang dianggarkan benar-

³ Augusta, Ivanovich. (2015). Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Studi tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 78-82.

⁴ Brodjonegoro, Bambang Strutanto. (2006). "Transparansi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi di Indonesia". Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol. 1, No. 2, hlm. 150.

⁵ Djauhari, Djati dan Suwanto. (2014). "Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Keuangan Publik: Analisis Audit Sosial di Beberapa Daerah Indonesia". Jurnal Governance, Vol. 5, No. 3, hlm. 240-245.

benar dilaksanakan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan.

Pada tahap pertanggungjawaban dan evaluasi, partisipasi publik muncul dalam bentuk pemberian tanggapan terhadap laporan keuangan pemerintah (LKPP) dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP), serta partisipasi dalam proses audit publik. Masyarakat civil society dapat melakukan audit sosial yang memberikan perspektif berbeda dari audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, pengawasan terhadap keuangan publik menjadi lebih komprehensif dan objektif.

2. Manfaat Partisipasi Publik untuk Transparansi Keuangan Negara

a. Pencegahan Korupsi dan Penggunaan Dana Publik yang Efisien

Partisipasi aktif publik dalam pengawasan keuangan negara terbukti menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. Ketika masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan publik dan aktif melakukan pengawasan, potensi terjadinya tindakan koruptif akan berkurang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi cenderung memiliki indeks korupsi yang lebih rendah. Transparansi yang tercipta dari partisipasi publik juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efisien untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

b. Peningkatan Responsivitas dan Akuntabilitas Pemerintah

Partisipasi publik yang kuat mendorong pemerintah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ketika pengambilan keputusan fiskal dilakukan secara transparan dengan melibatkan publik, keputusan tersebut akan lebih mencerminkan kepentingan mayoritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang kuat, dimana pemerintah harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik kepada

rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Akuntabilitas ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi moral dan politik.⁶

c. Penguatan Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial

Partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara merupakan wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang mencakup hak masyarakat untuk mengetahui, mempengaruhi, dan mengawasi penggunaan sumber daya ekonomi publik. Keterlibatan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan fiskal memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya menguntungkan sekelompok kecil, melainkan mempromosikan keadilan dan pembagian manfaat publik yang lebih merata. Dengan demikian, transparansi keuangan yang didukung partisipasi publik menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

3. Tantangan dan Hambatan Partisipasi Publik

a. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

Meskipun berbagai mekanisme partisipasi publik telah disediakan oleh pemerintah, masih terdapat hambatan struktural yang menghambat efektivitas partisipasi tersebut. Salah satunya adalah desain kelembagaan yang belum optimal, dimana partisipasi publik sering kali hanya bersifat penyangga atau tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Forum-forum partisipasi seperti Musrenbang kadang hanya menjadi formalitas tanpa benar-benar mengakomodasi aspirasi publik. Selain itu, inkonsistensi kebijakan dan peraturan antara tingkat pemerintahan pusat dan daerah juga menciptakan kebingungan mengenai mekanisme dan bentuk partisipasi yang seharusnya dilakukan.⁷

⁶ Hutapea, Haposan. (2017). "Transparansi Keuangan Negara dan Pencegahan Korupsi: Pembelajaran dari Implementasi Open Government Partnership di Indonesia". Jurnal Integritas Publik, Vol. 3, No. 2, hlm. 205-210.

⁷ Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 156-159.

b. Hambatan Teknis dan Infrastruktur Informasi

Hambatan teknis merupakan salah satu faktor utama yang menghambat akses masyarakat terhadap informasi keuangan publik. Meskipun undang-undang keterbukaan informasi telah disahkan, infrastruktur untuk menyediakan informasi masih belum memadai di sebagian besar organisasi pemerintah. Sistem informasi yang terkomputerisasi belum merata, website resmi pemerintah masih belum user-friendly, dan informasi keuangan sering disajikan dalam format yang terlalu teknis dan sulit dipahami masyarakat umum. Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan juga mempersulit akses informasi bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

c. Hambatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat

Tingkat literasi keuangan publik yang masih rendah menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi publik yang efektif. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan yang bermakna. Selain itu, tingkat kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam transparansi keuangan juga masih rendah, karena masyarakat cenderung merasakan jarak sosial dengan institusi pemerintah. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga menyebabkan partisipasi publik seringkali hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki motivasi dan kapasitas lebih tinggi, sementara kelompok marjinal kurang terwakili.⁸

4. Strategi Memaksimalkan Partisipasi Publik

a. Reformasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Partisipasi

Untuk memaksimalkan partisipasi publik, diperlukan reformasi dalam desain kelembagaan yang memberikan pengaruh nyata kepada publik dalam pengambilan keputusan fiskal. Mekanisme partisipasi harus memiliki basis hukum yang jelas, diiringi dengan

⁸ Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89-95.

komitmen politis dari pimpinan untuk benar-benar mengakomodasi masukan publik. Forum-forum partisipasi seperti Musrenbang perlu diperkuat dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada forum untuk mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran. Selain itu, dibutuhkan mekanisme feedback yang transparan yang menjelaskan bagaimana usulan dari publik ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Keuangan Publik

Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang lebih besar dalam mengembangkan infrastruktur informasi yang memudahkan akses publik terhadap data keuangan. Platform digital untuk keterbukaan anggaran perlu dikembangkan dengan antarmuka yang user-friendly dan konten yang dapat diakses di berbagai perangkat termasuk mobile. Informasi keuangan publik perlu disajikan tidak hanya dalam format statistik teknis, tetapi juga dalam visualisasi yang mudah dipahami oleh publik umum, misalnya infografis dan dashboard interaktif. Pelatihan dan pendampingan kepada pengelola data pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi yang disediakan.⁹

c. Program Literasi Keuangan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengatasi hambatan kesadaran dan kapasitas, diperlukan program sosialisasi dan pelatihan yang sistematis tentang pengelolaan keuangan negara dan cara-cara untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Program literasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari kampanye publik, sekolah, media massa, hingga organisasi-organisasi masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terwakili perlu mendapatkan perhatian khusus melalui program pemberdayaan yang disesuaikan dengan konteks lokal mereka. Kemitraan antara pemerintah, civil

⁹ Hikam, Muhammad AS. (2010). Negara, Civil Society, dan Demokratisasi. Jakarta: LP3ES, hlm. 134-140.

society, akademisi, dan media massa sangat penting untuk menciptakan gerakan sosial yang kohesif dalam mempromosikan transparansi dan partisipasi publik.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam tentang partisipasi publik dalam keuangan negara, dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik memainkan peran yang sangat krusial dalam mewujudkan transparansi keuangan negara sebagai pilar utama pemerintahan yang bertanggung jawab. Transparansi yang dihasilkan dari partisipasi publik tidak hanya berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi, tetapi juga memperkuat demokrasi ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan fiskal, sehingga alokasi sumber daya publik dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural-kelembagaan, teknis-infrastruktur, maupun kesadaran dan kapasitas masyarakat. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif, civil society, akademisi, dan media massa. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam membuka proses pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang mudah diakses, dan benar-benar mengakomodasi masukan dari publik. Sementara itu, civil society dan kelompok-kelompok masyarakat perlu terus mengembangkan kapasitas mereka dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan publik.

Ke depannya, perlu dilakukan reformasi kelembagaan yang memperkuat mekanisme partisipasi publik, peningkatan infrastruktur informasi yang memudahkan akses terhadap data keuangan publik, serta program literasi keuangan yang sistematis untuk memberdayakan masyarakat. Dengan adanya partisipasi publik yang efektif dan berkelanjutan, transparansi keuangan negara dapat benar-benar menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, dan

Eka Deviani, Anggiat Risky Halomoan Sibuea, Dame Melani Pasaribu, Felicia Marsha Uli Sijabat, Melanie Cintya Putri, Nova Cecelya Simanjuntak
Partisipasi Publik Dalam Keuangan Negara Sebagai Pilar Transparansi Pemerintahan

berpihak pada kepentingan rakyat. Investasi dalam transparansi dan partisipasi publik bukanlah pengeluaran sia-sia, melainkan investasi penting untuk pembangunan demokrasi dan keberlanjutan institusi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusta, Ivanovich. (2015). *Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Studi tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Hikam, Muhammad AS. (2010). *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Jurnal dan Artikel

- Brodjonegoro, Bambang Strutanto. (2006). "Transparansi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Djauhari, Djati dan Suwanto. (2014). "Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Keuangan Publik: Analisis Audit Sosial di Beberapa Daerah Indonesia". *Jurnal Governance*, Vol. 5, No. 3.
- Hutapea, Haposan. (2017). "Transparansi Keuangan Negara dan Pencegahan Korupsi: Pembelajaran dari Implementasi Open Government Partnership di Indonesia". *Jurnal Integritas Publik*, Vol. 3, No. 2.

Sumber Lainnya

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. (2016). *Pedoman Transparansi Anggaran*. Edisi Revisi 2016. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.